



PANTAI BELATUNG - Kondisi Pantai Belatung di Desa Pesinggahan, Dawan, yang bakal ditata untuk mendukung pariwisata di Klungkung.

Tahun 2018

## Penataan Pantai Belatung Dianggarkan Rp 1,7 Miliar

Semarapura, (Bali Post) -

*Detail Engineering Design (DED)* untuk penataan objek wisata Pantai Belatung di Desa Pesinggahan, Klungkung sudah selesai digarap. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung akan menyiapkan anggaran Rp 1,7 miliar pada tahun 2018. Hal ini diungkapkan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat ditemui belum lama ini.

"Setelah melakukan penataan di cagar budaya Goa Jepang, selanjutnya kita akan lakukan penataan di pesisir Pantai Belatung. Tahun 2018 nanti, penataannya akan kita anggarkan sekitar Rp 1,7 miliar," kata Suwirta. Menurutnya, penataan pesisir Pantai Belatung akan menjadi prioritas. Penataan-

nya akan dilakukan bersamaan dengan objek wisata Goa Lawah yang juga rencananya akan dianggarkan tahun 2018.

Nantinya, di pesisir Pantai Belatung akan dibangun konsep pariwisata terintegrasi antara aktivitas petani garam, nelayan dan pariwisata pantai. Selain dibangun bale

bengong, juga akan dibuat jalan setapak di sepanjang pesisir Pantai Belatung.

Semak-semak juga akan dibersihkan, dan akan dibangun banyak *rest area* dan area publik untuk menunjang objek wisata Goa Lawah yang selama ini dikenal menjadi ikon Pariwisata di Kecamatan Dawan.

"Penataan kita lakukan di pesisir pantai Belatung, dengan ikonnya nanti ada Pura Goa Lawah. Saya harap masyarakat bisa mendukung rencana ini. Setelah selesai penataan, nanti pengelolaannya akan kita serahkan ke Desa Pakraman, bukan Pemkab lagi," jelas Suwirta. Terkait permasalahan lahan, Bupati Suwirta tidak menampik jika di pesisir Pantai Belatung ada beberapa lahan yang sudah di SPPT dan bahkan menjadi hak milik.

Namun, dia menyebut masih ada sekitar 14 are

lahan yang berstatus tanah negara dan akan dimanfaatkan untuk penataan pesisir Pantai Belatung. "Memang ada juga orang luar yang punya tanah di sana. Tapi saya tidak akan masuk ke ranah itu. Jika pemilik lahan tersebut bisa diajak kerjasama, kita akan kerjasama. Tapi jika tidak, ya kita tinggalkan saja. Kita utamakan untuk melakukan penataan di tanah yang kosong, dan di pesisir Pantai Belatung itu masih banyak lahan yang kosong," tandas Suwirta. (kmb)

Edisi : Kamis, 20 April 2017

Hal : 10



## Diperiksa sebagai Terdakwa, Sukarya Sesali Perbuatannya

### Dugaan Korupsi Pembangunan Balai Banjar

#### Denpasar (Bali Post) -

Meski merasa tidak mutlak bersalah dalam pertanggungjawaban dana bantuan Pemkab Tabanan untuk pembangunan balai banjar, I Nyoman Sukarya, terdakwa kasus dugaan korupsi bantuan hibah Pemkab Tabanan, mengaku sangat menyesal atas perbuatannya. Hal itu disampaikan terdakwa, sebelum majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila menutup persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Rabu (19/4) kemarin.

"Saya sangat menyesali, Pak. Namun berdasarkan kesepakatan banjar, bahwa

dana bantuan sudah semua terpakai untuk membangun balai banjar," tandas terdakwa Nyoman Sukarya.

Majelis hakim lantas menimpali bahwa kasus ini dijadikan sebagai pelajaran oleh semua pihak yang menerima bantuan pemerintah. "Ini pelajaran bagi saudara terdakwa. Mestinya, berapa uang diterima dari pemerintah, segitu pertanggungjawabannya. Tidak ada istilah potong-potongan. Tetapi, ini sudah telanjur terjadi," ujar ketua majelis hakim Wayan Sukanila.

Sementara dalam pemeriksaan se-

bagai terdakwa, Sukarya mengatakan, uang yang diterimanya sudah digunakan untuk membangun Balai Banjar Lalangpasek, Desa Cepaka, Kediri, Tabanan.

Kuasa hukum terdakwa menanyakan soal dana Rp 75 juta, yakni dana Rp 75 juta atas inisiatif siapa diberikan ke saksi Wayan Sukaja. Terdakwa mengatakan ada kesepakatan banjar. Yang menyerahkan terdakwa sendiri ke Wayan Sukaja. Uang itu digunakan untuk membangun, plus uang bantuan dari pemkab. Uang Rp 75 juta sudah digunakan dan berjalan

dengan lancar.

Lantas, bagaimana dengan uang Rp 200 juta lebih? Terdakwa juga mengatakan sudah dipakai. Pasalnya, uang Rp 75 juta tidak mungkin bisa digunakan atau merampungkan pembangunan balai banjar semegah itu.

Sebelumnya dalam kesaksian, mantan anggota DPRD Tabanan membantah menerima uang dari bantuan hibah pembangunan balai banjar tersebut. Bantahan itu di antaranya disampaikan Wayan Sukaja yang merupakan mantan Ketua DPRD Tabanan. (kmb37)

Edisi : Kamis 20 April 2017

Hal : 12